

TRANSFORMASI POLITIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN MENUJU KEPEMIMPINAN BERINTEGRITAS

Marzuki¹, Nurul Izzah Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

marzuki110000173@uinsu.ac.id¹, nurulizzahnst30@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis transformasi politik Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an menuju kepemimpinan berintegritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari kajian pustaka dan dokumen-dokumen relevan, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber literatur untuk memastikan keabsahan temuan. Kepemimpinan Berintegritas dalam Perspektif Al-Qur'an menekankan pentingnya karakteristik seperti keadilan dan kejujuran dalam kepemimpinan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas di tengah pluralisme politik, ada peluang untuk membangun sistem yang lebih adil dan bersih melalui strategi seperti penguatan lembaga penegak hukum, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kepemimpinan politik Indonesia menawarkan potensi untuk memperbaiki integritas dan efektivitas sistem politik, meskipun membutuhkan strategi yang sensitif terhadap tantangan dan keberagaman yang ada.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Kepemimpinan, Politik

Abstract

This research aims to understand and analyze Indonesia's political transformation from the perspective of the Koran towards leadership with integrity. This research uses a descriptive qualitative approach, the data sources used in this research are secondary data originating from literature reviews and relevant documents, data analysis in this research uses content analysis, this research uses source triangulation, namely by comparing and verify data from various literature sources to ensure the validity of the findings. Leadership with Integrity in Perspective The Qur'an emphasizes the importance of characteristics such as justice and honesty in leadership, as well as how these values can be applied in the Indonesian context. Although there are challenges in realizing leadership with integrity amidst political pluralism, there are opportunities to build a fairer and cleaner system through strategies such as strengthening law enforcement institutions, political education,

and community participation. Overall, implementing the values of the Koran in Indonesian political leadership offers the potential to improve the integrity and effectiveness of the political system, although it requires strategies that are sensitive to existing challenges and diversity.

Keywords: *Al-Qur'an, Leadership, Politics*

PENDAHULUAN

Transformasi politik di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan perubahan dalam struktur, institusi, serta perilaku politik masyarakat. Sejak era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan praktik politik. Meskipun terdapat kemajuan dalam aspek demokratisasi, tantangan terhadap integritas politik tetap menjadi masalah yang mendesak. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya akuntabilitas menjadi isu utama yang mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sukardi, 2020).

Politik yang berintegritas sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Integritas dalam politik mencakup kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada rakyat. Dalam konteks Indonesia, di mana berdemokrasi berarti melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, penting bagi para pemimpin untuk menunjukkan integritas agar dapat membangun kepercayaan publik. Menurut Sembiring (2021), integritas politik dapat dicapai melalui sistem yang mendukung partisipasi masyarakat dan pengawasan yang efektif terhadap tindakan pemerintah.

Di tengah tantangan integritas politik, perspektif Al-Qur'an dapat memberikan panduan yang kuat dalam membentuk kepemimpinan yang berintegritas. Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang relevan bagi para pemimpin, seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi (Hafiz, 2019). Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, yang menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam memimpin. Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an menekankan bahwa pemimpin harus bertindak adil dan tidak menyeleweng dari nilai-nilai moral yang telah ditetapkan.

Meskipun Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghalangi upaya untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurut

laporan *Transparency International* (2020), Indonesia masih berada di peringkat yang rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan berkurangnya partisipasi publik dalam proses demokrasi. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam transformasi politik adalah kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi, sehingga mereka cenderung apatis terhadap politik. Menurut penelitian oleh Widiastuti (2020), pendidikan politik yang rendah ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, penting untuk menjajaki bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan dalam proses transformasi politik di Indonesia. Ajaran Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai landasan moral bagi para pemimpin untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas. Dalam konteks ini, pemimpin yang berintegritas tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam politik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pemimpin serta masyarakat. Program-program pendidikan yang mengedepankan etika dan moral dalam kepemimpinan dapat membantu membentuk karakter pemimpin yang berintegritas. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap tindakan pemerintah, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga integritas politik.

Dengan demikian, transformasi politik Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an menuju kepemimpinan berintegritas merupakan suatu upaya yang sangat penting. Dalam konteks tantangan yang dihadapi, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi panduan bagi para pemimpin untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas. Penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan mengawasi tindakan pemerintah agar tercipta sistem politik yang bersih dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis transformasi politik Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an menuju kepemimpinan berintegritas. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih mendalam terkait fenomena politik dan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam konteks kepemimpinan modern di Indonesia.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji makna dari proses transformasi politik yang terjadi di Indonesia dan kaitannya dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif lebih cocok untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks, termasuk dalam hal ini adalah perubahan politik yang terkait dengan moralitas dan integritas dalam kepemimpinan. Pendekatan ini juga membantu peneliti memahami konteks sosial, politik, dan agama yang melingkupi fenomena tersebut (Creswell, 2014).

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan kondisi politik Indonesia dan relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam membentuk kepemimpinan yang berintegritas. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan untuk menggambarkan fenomena secara detail berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur, dokumen, dan kajian teoretis. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel atau fenomena yang sedang diteliti, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel (Sugiyono, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari kajian pustaka dan dokumen-dokumen relevan. Peneliti menggunakan berbagai literatur terkait politik, Al-Qur'an, serta kepemimpinan berintegritas. Data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku referensi yang relevan, dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan politik Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan metode *literature review* yang dijelaskan oleh Zed (2004), di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis untuk memahami suatu fenomena (Zed, 2004).

Data dikumpulkan melalui dokumentasi yang mencakup analisis terhadap teks-teks Al-Qur'an, jurnal ilmiah, dan laporan-laporan penelitian terkait dengan politik dan kepemimpinan. Teknik dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang valid dan

reliabel tanpa terikat pada tempat dan waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Bowen (2009) dalam kajian tentang penggunaan dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Teknik ini juga berguna untuk memverifikasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber (Bowen, 2009).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks-teks yang dianalisis, terutama terkait dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan politik. Menurut Krippendorff (2013), analisis isi adalah teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkap makna tersembunyi di balik teks atau dokumen. Teknik ini relevan dalam penelitian yang menelaah hubungan antara teks Al-Qur'an dan implementasinya dalam kepemimpinan berintegritas (Krippendorff, 2013).

Dalam memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber literatur untuk memastikan keabsahan temuan. Patton (2015) menjelaskan bahwa triangulasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif dengan melibatkan berbagai sumber data atau metode pengumpulan data yang berbeda (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Politik di Indonesia

1. Sejarah dan Dinamika Politik Indonesia

Perjalanan politik Indonesia telah melalui berbagai fase yang kompleks, dimulai dari masa kolonial hingga pasca-reformasi. Pada masa kolonial, kekuasaan dipegang oleh pemerintah Belanda yang menerapkan kebijakan represif terhadap rakyat Indonesia. Sistem politik yang otoriter ini menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan tanpa hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini memicu munculnya gerakan perlawanan di berbagai daerah yang kemudian menjadi cikal bakal pergerakan nasional (Wibowo, 2018). Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki era politik yang penuh dinamika, dengan sistem demokrasi parlementer yang diterapkan pada awal kemerdekaan. Namun, ketidakstabilan politik dan konflik internal mengakibatkan ketegangan antara faksi-faksi politik, yang berujung pada transisi ke sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (Subhan, 2020).

Pada masa Orde Baru (1966-1998), di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik yang relatif baik, tetapi dengan pengorbanan terhadap kebebasan politik. Soeharto membangun sistem pemerintahan yang sentralistik, di mana kekuasaan terpusat pada presiden dan militer memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas. Namun, di balik kestabilan tersebut, Orde Baru juga dikenal dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dilakukan oleh elit politik dan birokrasi (Agus, 2019). Sistem politik yang tertutup ini akhirnya runtuh ketika krisis ekonomi Asia pada 1997 menghantam Indonesia, yang diikuti dengan tuntutan reformasi oleh masyarakat.

Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi transformasi politik Indonesia. Soeharto akhirnya mundur setelah 32 tahun berkuasa, membuka jalan bagi era reformasi yang ditandai dengan perubahan fundamental dalam sistem politik dan pemerintahan. Reformasi menuntut adanya pembenahan dalam sistem politik yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan (Marwati, 2020). Amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu langsung, dan desentralisasi kekuasaan menjadi beberapa hasil penting dari era reformasi ini.

Reformasi 1998 memainkan peran penting dalam membentuk sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar adalah amandemen terhadap UUD 1945, yang membuka ruang bagi pelaksanaan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memungkinkan terjadinya dominasi politik oleh kelompok tertentu (Mahfud MD, 2019). Reformasi juga memperkuat peran lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini merajalela di kalangan elit politik.

Kebebasan berpendapat yang sebelumnya ditekan pada era Orde Baru juga mulai dijamin oleh negara. Media massa, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah (Santoso, 2021). Demokrasi yang lebih terbuka ini menjadi landasan bagi penguatan hak-hak politik rakyat, meskipun tantangan masih ada, seperti maraknya praktik politik uang dan korupsi yang menggerogoti sistem politik.

Namun, meskipun reformasi membawa perubahan positif, upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih mapan di Indonesia masih menemui berbagai hambatan. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di kalangan elit politik. Meskipun

KPK telah berperan signifikan dalam memberantas korupsi, perlawanan dari kalangan yang merasa dirugikan oleh upaya pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan besar bagi sistem demokrasi di Indonesia (Pratama, 2018).

2. Krisis Kepemimpinan dan Korupsi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam konteks kepemimpinan adalah maraknya kasus korupsi yang melibatkan elit politik. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti berbagai sendi kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan elit politik, seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus korupsi e-KTP, menunjukkan betapa korupsi telah mengakar dalam sistem politik Indonesia (Wibisono, 2020). Elit politik yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas justru terlibat dalam berbagai skandal yang merusak citra kepemimpinan di Indonesia.

Korupsi di kalangan elit politik tidak hanya merusak citra mereka di mata publik, tetapi juga menghambat pembangunan negara. Praktik korupsi menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia, di mana masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan oleh praktik korupsi (Hidayat, 2019).

Korupsi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga secara signifikan memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Masyarakat yang menyaksikan para pemimpin politik terlibat dalam korupsi secara langsung kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemerintahan. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan sangat rendah, sebagian besar disebabkan oleh maraknya kasus korupsi (Suryadi, 2021). Krisis kepercayaan ini menjadi tantangan besar bagi upaya pemerintah dalam membangun sistem politik yang bersih dan akuntabel.

Korupsi juga memperlemah legitimasi pemerintah di mata masyarakat internasional. Dalam konteks politik global, negara-negara yang dikenal korup sering kali kehilangan daya tawar dalam pergaulan internasional, baik dalam hal kerjasama ekonomi maupun politik. Oleh

karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat kepercayaan masyarakat (Nurhadi, 2020).

3. Reformasi Birokrasi dan Upaya Pembaruan Sistem

Upaya reformasi birokrasi dan pembaruan sistem politik terus dilakukan oleh pemerintah pasca-reformasi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini dianggap lamban, tidak efisien, dan penuh dengan praktik korupsi. Salah satu upaya reformasi birokrasi yang paling signifikan adalah penerapan sistem merit dalam rekrutmen pegawai negeri, yang bertujuan untuk mengurangi nepotisme dan kolusi dalam pengangkatan pejabat publik (Arifin, 2019). Sistem merit ini memastikan bahwa hanya orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi yang dapat menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Selain itu, KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi telah memainkan peran penting dalam memperbaiki citra kepemimpinan di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah berhasil menangkap sejumlah besar pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi. Namun, upaya KPK dalam memberantas korupsi sering kali dihadapkan pada perlawanan dari kalangan elit politik yang merasa terancam oleh pemberantasan korupsi (Susilo, 2021). Meski demikian, reformasi birokrasi dan pembenahan sistem politik masih terus berjalan, meskipun tidak tanpa tantangan.

Salah satu tantangan besar dalam reformasi birokrasi adalah masih adanya resistensi dari dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Banyak pejabat birokrasi yang masih enggan melakukan perubahan karena sudah terlalu nyaman dengan sistem lama yang memberikan mereka keuntungan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk terus mendorong reformasi birokrasi agar Indonesia dapat memiliki sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel (Firdaus, 2019).

B. Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Kepemimpinan Indonesia

1. Relevansi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Konteks Politik Modern

Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat menjadi landasan dalam sistem politik modern, termasuk dalam konteks demokrasi. Salah satu prinsip fundamental yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah keadilan (*al-'adl*), yang menuntut setiap pemimpin untuk bertindak adil dalam setiap keputusan yang diambil (Rizkiana, 2020). Konsep keadilan

dalam Al-Qur'an relevan dengan politik modern yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan penghormatan terhadap hak-hak individu serta masyarakat. Dalam konteks politik demokrasi, keadilan menjadi prinsip penting dalam pengelolaan negara, terutama dalam pembagian sumber daya, penegakan hukum, dan kebijakan publik. Sebagai contoh, Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 58 bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan apabila memutuskan perkara di antara manusia, seorang pemimpin harus memutuskan dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi juga instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis (Rizkiana, 2020).

Selain itu, nilai amanah (*trustworthiness*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga sangat relevan dalam konteks politik modern. Amanah dalam politik dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola kekuasaan dan sumber daya negara dengan penuh tanggung jawab dan integritas (Arifin, 2021). Dalam demokrasi, pemimpin yang amanah adalah mereka yang menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penerapan prinsip ini dalam politik modern dapat memperkuat legitimasi pemimpin di mata rakyat, karena masyarakat akan lebih mempercayai pemimpin yang dapat menjalankan amanah dengan baik. Amanah ini juga berhubungan dengan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya negara (Nasution, 2022).

Dalam konteks politik modern, nilai-nilai Al-Qur'an juga relevan dengan konsep musyawarah (*shura*), yaitu prinsip deliberasi dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, prinsip musyawarah tercermin dalam proses legislatif, di mana keputusan penting dibuat melalui diskusi dan partisipasi publik. Al-Qur'an, melalui Surah Asy-Syura ayat 38, mengajarkan bahwa keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah, yang menggambarkan betapa pentingnya partisipasi kolektif dalam sistem politik. Nilai ini sangat relevan dalam demokrasi modern, di mana kebijakan publik harus mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kehendak segelintir elit politik (Ismail, 2021).

2. Implementasi Prinsip Keadilan, Amanah, dan Tanggung Jawab dalam Kepemimpinan Indonesia

Dalam sejarah politik Indonesia, beberapa pemimpin telah mencoba untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam kebijakan mereka.

Salah satu contoh adalah Presiden Soekarno, yang dalam masa kepemimpinannya berusaha membangun dasar-dasar keadilan sosial melalui konsep "Sosialisme Indonesia" yang berlandaskan pada prinsip keadilan untuk semua rakyat Indonesia (Wibisono, 2020). Meskipun bukan seorang pemimpin Islam yang secara eksplisit menerapkan hukum syariah, nilai keadilan yang dianut Soekarno sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang pentingnya memajukan kesejahteraan sosial tanpa diskriminasi.

Selain itu, salah satu pemimpin yang sering kali dipandang menerapkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinannya adalah Muhammad Hatta. Sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia, Hatta dikenal dengan integritasnya dalam menjaga kekayaan negara. Ia menolak berbagai tawaran dan kesempatan yang dapat merugikan negara, yang menunjukkan sikap amanah dalam memimpin. Konsep amanah dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mu'minin ayat 8, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, yang tercermin dalam kepemimpinan Hatta (Mustafa, 2021).

Kepemimpinan yang berdasarkan pada tanggung jawab juga dapat ditemukan dalam upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu kebijakan penting Jokowi adalah fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata, yang dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh Indonesia. Meskipun kebijakan ini tidak secara eksplisit bersumber dari Al-Qur'an, prinsip keadilan yang diterapkan Jokowi memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah prinsip yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur (Haryanto, 2019).

3. Peran Etika Islam dalam Meningkatkan Integritas Kepemimpinan

Etika Islam memainkan peran penting dalam membentuk integritas kepemimpinan. Salah satu cara untuk meningkatkan integritas pemimpin politik di Indonesia adalah melalui pendidikan politik berbasis agama. Pendidikan ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2020), pendidikan politik yang berlandaskan etika Islam mampu membentuk karakter pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi.

Etika Islam menekankan pentingnya kejujuran (*sidq*) dalam setiap tindakan pemimpin. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Ahzab ayat 70, mengingatkan pemimpin untuk selalu berkata benar dan jujur dalam segala situasi. Hal ini sangat penting dalam politik modern, di mana transparansi dan kejujuran menjadi tuntutan utama dari masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Pemimpin yang jujur akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi politiknya (Fauzi, 2021).

Selain itu, tanggung jawab (*mas'uliyah*) adalah nilai lain yang diajarkan dalam Islam dan sangat relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada tugas-tugas yang bersifat teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral akan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap masyarakat luas. Dalam konteks ini, pendidikan politik berbasis agama dapat membantu pemimpin untuk memahami tanggung jawab mereka tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan (Fahmi, 2019).

Pendidikan politik berbasis agama juga dapat mendorong pemimpin untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Prinsip-prinsip kesejahteraan sosial (*maslahah*) yang diajarkan dalam Islam sangat relevan dalam politik modern. Pemimpin yang memahami prinsip ini akan selalu berusaha untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan (Hasan, 2020). Implementasi nilai-nilai ini dapat memperbaiki sistem politik yang korup dan memperkuat integritas para pemimpin.

C. Kepemimpinan Berintegritas dalam Perspektif Al-Qur'an

1. Ciri-Ciri Kepemimpinan Berintegritas dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Salah satu ciri utama kepemimpinan berintegritas dalam Islam adalah kejujuran (*sidq*). Pemimpin yang jujur akan selalu menyampaikan kebenaran tanpa manipulasi, baik dalam ucapan maupun tindakan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kejujuran dalam Surah Al-Ahzab ayat 70, yang mendorong orang beriman untuk bertakwa dan berkata benar. Dalam konteks ini, seorang pemimpin Islam harus mampu menjaga kejujuran sebagai fondasi utama kepemimpinannya (Hasan, 2020).

Selain kejujuran, amanah (*trustworthiness*) merupakan ciri penting lainnya dari kepemimpinan berintegritas dalam Islam. Amanah menuntut seorang pemimpin untuk dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini tercermin dalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan bertindak adil dalam memutuskan perkara. Pemimpin yang amanah tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi (Arifin, 2021).

Keadilan (*al-'adl*) adalah ciri lain yang sangat penting dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya harus adil dalam memutuskan perkara, tetapi juga dalam membagikan sumber daya dan memperlakukan rakyatnya. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam banyak ayat, termasuk dalam Surah An-Nahl ayat 90, di mana Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan kepada kaum kerabat. Prinsip keadilan dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga seorang pemimpin Islam harus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi semua rakyatnya (Syarifuddin, 2021).

2. Kepemimpinan Ideal Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya di Indonesia

Al-Qur'an menggambarkan sosok pemimpin ideal melalui berbagai karakteristik seperti adil, jujur, dan amanah. Dalam konteks politik Indonesia, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk membangun kepemimpinan yang lebih berintegritas. Salah satu konsep utama kepemimpinan dalam Al-Qur'an adalah keadilan, yang menjadi salah satu pilar dalam sistem politik demokrasi modern. Pemimpin yang adil akan selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diambil (Mahfud, 2019).

Selain keadilan, konsep amanah yang diajarkan dalam Al-Qur'an juga sangat relevan dengan kepemimpinan di Indonesia. Amanah menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Pemimpin yang amanah akan senantiasa menjaga kepercayaan rakyat dan tidak akan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah panjang tentang korupsi, amanah menjadi salah satu prinsip penting yang harus diterapkan oleh para pemimpin untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (Suryadi, 2021).

Pemimpin yang jujur (sidq) juga sangat dibutuhkan dalam sistem politik Indonesia. Kejujuran dalam Al-Qur'an tidak hanya berarti berkata benar, tetapi juga menjalankan tugas dengan transparan dan tanpa manipulasi. Pemimpin yang jujur akan lebih dihormati dan dipercaya oleh rakyatnya, karena mereka merasa bahwa pemimpin tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks Indonesia, di mana sering kali ditemukan kasus manipulasi politik dan korupsi, nilai kejujuran ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki citra kepemimpinan nasional (Nurhadi, 2020).

3. Implementasi dalam Sistem Politik Indonesia

Penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dalam sistem politik Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pluralisme politik yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan politik, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan di Indonesia sering kali harus menyesuaikan dengan kondisi pluralisme tersebut. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum seperti keadilan, amanah, dan kejujuran tetap dapat diterapkan tanpa harus mengorbankan keragaman yang ada (Subhan, 2020).

Salah satu peluang dalam mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas berdasarkan ajaran Al-Qur'an di Indonesia adalah adanya reformasi birokrasi yang sedang berlangsung. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan reformasi, berusaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Reformasi ini sejalan dengan nilai-nilai amanah dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Upaya reformasi ini, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, dapat membantu menciptakan pemimpin yang lebih berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat (Pratama, 2018).

Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya korupsi yang masih merajalela di kalangan elit politik. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menggambarkan betapa sulitnya menerapkan amanah dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik yang berbasis etika dan moralitas Islam untuk membentuk pemimpin yang lebih bertanggung jawab. Pendidikan ini dapat membantu calon pemimpin memahami pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan tugas mereka (Susilo, 2021).

Meskipun tantangan-tantangan tersebut ada, penerapan nilai-nilai kepemimpinan Al-Qur'an tetap memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan kejujuran adalah nilai universal yang dapat diterapkan dalam segala sistem politik, termasuk dalam demokrasi yang pluralistik seperti di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai ini dapat dijadikan landasan untuk menciptakan kepemimpinan yang berintegritas dan mampu membawa Indonesia menuju pemerintahan yang lebih baik (Marwati, 2020).

D. Tantangan dan Peluang Menerapkan Kepemimpinan Berintegritas

1. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Sistem Politik Indonesia

Menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem politik Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya kasus korupsi di kalangan elit politik. Korupsi, yang sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, menjadi hambatan utama dalam menerapkan nilai-nilai amanah (kepercayaan) yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Korupsi merusak integritas kepemimpinan dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem politik. Studi yang dilakukan oleh Susilo (2021) menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia memperlemah fondasi etika dan moralitas kepemimpinan, sehingga sulit bagi nilai-nilai keislaman seperti keadilan dan amanah untuk diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan politik (Susilo, 2021).

Selain korupsi, budaya politik permisif juga menjadi penghambat penerapan nilai-nilai Al-Qur'an. Budaya politik permisif di Indonesia ditandai dengan adanya toleransi terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, seperti politik uang, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Budaya ini membuat masyarakat cenderung memaafkan atau mengabaikan pelanggaran etika politik yang seharusnya diberantas. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan dan amanah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sulit untuk diterapkan karena masyarakat sendiri sering kali tidak menuntut pemimpin untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut (Arifin, 2020).

Faktor lain yang turut menghambat implementasi nilai-nilai Al-Qur'an adalah pluralisme agama dan budaya yang kuat di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman agama,

budaya, dan etnis, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik sering kali menimbulkan polemik dan ketegangan. Meskipun Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, banyak pihak yang merasa bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam politik dapat mengabaikan pluralisme yang ada. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan konsensus politik yang berbasis pada nilai-nilai keislaman (Marwati, 2020).

2. Peluang Penerapan Nilai Al-Qur'an dalam Sistem Politik Pluralistik

Meskipun tantangan-tantangan tersebut ada, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem politik Indonesia masih memiliki peluang besar, terutama jika nilai-nilai tersebut dipahami dan diterapkan dalam kerangka pluralisme. Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal, seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kejujuran (*sidq*), yang dapat diterapkan dalam sistem politik apa pun, termasuk demokrasi sekuler. Dalam konteks politik Indonesia yang pluralistik, prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dengan baik tanpa mengabaikan keragaman agama dan budaya yang ada. Menurut penelitian Mahfud (2019), nilai-nilai Al-Qur'an seperti keadilan sosial dan persamaan hak dapat diterapkan secara efektif dalam sistem politik modern yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia (Mahfud, 2019).

Salah satu cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem politik pluralistik adalah melalui pendidikan politik yang berbasis moralitas agama. Pendidikan politik yang menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kepemimpinan dapat membantu membentuk pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan amanah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Studi yang dilakukan oleh Rahmat (2021) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berbasis agama dapat menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam politik, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme (Rahmat, 2021).

Penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam politik juga dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Indonesia telah memulai berbagai inisiatif untuk mereformasi birokrasi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan program e-government, yang bertujuan untuk

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Langkah-langkah ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan. Jika reformasi birokrasi ini dijalankan dengan konsisten, peluang untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem politik Indonesia akan semakin besar (Suryadi, 2021).

3. Strategi Penguatan Kepemimpinan Berintegritas

Untuk mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawasan, seperti KPK dan Ombudsman, agar mereka lebih efektif dalam memberantas korupsi dan pelanggaran etika politik. Dengan memperkuat lembaga-lembaga ini, akan tercipta lingkungan politik yang lebih bersih dan berintegritas, di mana nilai-nilai Al-Qur'an seperti amanah dan kejujuran dapat diterapkan dengan lebih mudah (Pratama, 2020).

Selain penguatan lembaga penegak hukum, reformasi dalam sistem pendidikan politik juga menjadi strategi penting untuk membangun kepemimpinan berintegritas. Pendidikan politik yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika agama dapat menjadi sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki integritas moral. Pendidikan semacam ini bisa diterapkan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, serta dalam program-program pelatihan untuk para politisi dan pejabat publik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rahmat (2021), yang menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berbasis moral agama memiliki dampak positif dalam membentuk karakter kepemimpinan yang lebih berintegritas (Rahmat, 2021).

Strategi lainnya adalah dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Masyarakat yang aktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah akan menjadi pengawas yang efektif dalam menjaga integritas pemimpin. Partisipasi masyarakat ini bisa diperkuat melalui media sosial, forum-forum publik, dan program-program literasi politik yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Menurut Mahfud (2019), masyarakat yang terlibat aktif dalam proses politik akan lebih mampu menuntut akuntabilitas dari para pemimpin, sehingga nilai-nilai keadilan dan amanah dapat lebih mudah diterapkan (Mahfud, 2019).

Terakhir, pembentukan budaya politik yang lebih sehat dan berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an juga sangat penting. Budaya politik yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan nilai-nilai Al-Qur'an. Hal ini bisa dimulai dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap politik dan kepemimpinan, serta membangun kesadaran bahwa pemimpin yang berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan (Suryadi, 2021).

KESIMPULAN

Sejarah dan Dinamika Politik Indonesia menunjukkan bahwa perjalanan politik Indonesia dari masa kolonial hingga pasca-reformasi telah melalui berbagai perubahan signifikan, dengan reformasi menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem politik yang lebih demokratis. Namun, masalah korupsi dan krisis kepemimpinan yang melanda elit politik menjadi tantangan utama dalam mencapai kepemimpinan yang berintegritas. Korupsi mengganggu kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik, sedangkan budaya politik permisif mempengaruhi penerapan nilai-nilai moral.

Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Kepemimpinan Indonesia menawarkan peluang untuk memperbaiki sistem politik melalui penerapan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Pendidikan politik berbasis agama dan reformasi birokrasi yang meningkatkan transparansi adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam sistem politik modern dan pluralistik.

Kepemimpinan Berintegritas dalam Perspektif Al-Qur'an menekankan pentingnya karakteristik seperti keadilan dan kejujuran dalam kepemimpinan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam mewujudkan kepemimpinan yang berintegritas di tengah pluralisme politik, ada peluang untuk membangun sistem yang lebih adil dan bersih melalui strategi seperti penguatan lembaga penegak hukum, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat.

Tantangan dan Peluang Penerapan Nilai-nilai Al-Qur'an menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan besar seperti korupsi dan budaya politik permisif, nilai-nilai Al-Qur'an masih memiliki relevansi dan peluang untuk diterapkan dalam sistem politik Indonesia yang pluralistik. Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi dalam birokrasi, pendidikan politik, dan penguatan lembaga penegak hukum, kepemimpinan berintegritas dapat

dicapai.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kepemimpinan politik Indonesia menawarkan potensi untuk memperbaiki integritas dan efektivitas sistem politik, meskipun membutuhkan strategi yang sensitif terhadap tantangan dan keberagaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2019). Korupsi di Indonesia: Antara Budaya dan Kebijakan. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 123-136.
- Arifin, M. (2020). Budaya Politik dan Tantangan Kepemimpinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 122-134.
- Arifin, M. (2021). Relevansi Amanah dalam Al-Qur'an dengan Kepemimpinan Modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 112-123.
- Arifin, Z. (2019). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 45-57.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Darwis, F. (2020). Pendidikan Politik Berbasis Agama dan Peningkatan Integritas Pemimpin di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik*, 12(1), 67-78.
- Fahmi, A. (2019). Tanggung Jawab Moral dalam Kepemimpinan Islam. *Jurnal Etika Islam*, 7(2), 88-97.
- Fauzi, M. (2021). Kejujuran dalam Etika Politik Islam. *Jurnal Politik Islam*, 8(1), 54-65.
- Firdaus, M. (2019). Menakar Efektivitas Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan*, 18(1), 56-70.
- Hafiz, A. (2019). Aplikasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 123-135.
- Haryanto, D. (2019). Reformasi Birokrasi dan Nilai-Nilai Keadilan dalam Islam: Kajian Kebijakan Presiden Jokowi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 102-115.
- Hasan, N. (2020). Masalah dan Kebijakan Publik dalam Konteks Kepemimpinan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 18(4), 213-225.

- Hidayat, M. (2019). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 13(4), 87-99.
- Ismail, Z. (2021). Musyawarah dalam Al-Qur'an: Implikasinya pada Sistem Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat dan Politik*, 5(2), 45-59.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mahfud MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwati, D. (2020). Dinamika Politik Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Sejarah dan Politik*, 5(3), 233-247.
- Mustafa, H. (2021). Amanah dalam Kepemimpinan Muhammad Hatta: Sebuah Kajian Historis. *Jurnal Sejarah Islam*, 14(1), 77-88.
- Nasution, F. (2022). Nilai Amanah dalam Politik Modern: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Politik Islam*, 9(3), 89-101.
- Nurhadi, R. (2020). Indonesia dalam Politik Global: Tantangan Integritas. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 133-146.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pratama, A. (2018). Krisis Kepemimpinan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(1), 89-102.
- Pratama, A. (2020). Penguatan Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 9(1), 78-91.
- Rahmat, A. (2021). Pendidikan Politik Berbasis Agama sebagai Sarana Pembentukan Karakter Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Politik*, 12(1), 45-58.
- rifin, M. (2021). Relevansi Amanah dalam Al-Qur'an dengan Kepemimpinan Modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 112-123.
- Rizkiana, E. (2020). Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Demokrasi. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 15(2), 76-88.
- Santoso, E. (2021). Perkembangan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Demokrasi*, 10(1), 101-114.
- Sembiring, E. (2021). Integritas dalam Politik: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 45-60.

- Subhan, F. (2020). Transisi Demokrasi di Indonesia: Dari Orde Lama ke Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 43-58.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, R. (2020). Korupsi dalam Politik Indonesia: Analisis dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 5(1), 67-80.
- Suryadi, A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi dan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Politik*, 9(1), 78-89.
- Suryadi, A. (2021). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 56-68.
- Susilo, H. (2021). KPK dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 22(2), 112-128.
- Syarifuddin, A. (2021). Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Demokrasi. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 97-109.
- Transparency International. (2020). *Indeks Persepsi Korupsi 2020*. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>.
- Wibisono, S. (2020). Kasus Korupsi Elit Politik di Indonesia: Tantangan Bagi KPK. *Jurnal Hukum Pidana*, 16(3), 221-235.
- Wibisono, S. (2020). Soekarno dan Keadilan Sosial: Sebuah
- Wibowo, J. (2018). Sejarah Politik Indonesia dari Kolonial Hingga Reformasi. *Jurnal Sejarah*, 9(1), 102-115.
- Widiastuti, E. (2020). Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Sosial dan Politik*, 3(1), 101-115.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.